

---

## ANALISA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PADA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DARI PERSPEKTIF AUSTRALIA

Oleh  
**Mulyadi**  
 Mahasiswa Prodi Strategi Perang Semesta, Unhan RI  
 Email: [mulyadi.zi98@gmail.com](mailto:mulyadi.zi98@gmail.com)

### Abstrak

Negara Persemakmuran Australia, memiliki Ibukota Negara di Canberra, yang berada di *Australian Capital Territorial*. Ketegangan di Laut China Selatan terus melonjak. Tensi ini terjadi karena aksi asertif Cina yang terus berlanjut ditambah dengan memburuknya hubungan Amerika Serikat (AS)-China atas berbagai masalah termasuk Laut China Selatan. *Domestic Source* atau sumber lingkungan internal suatu negara akan mempengaruhi sifat dan jalannya kebijakan politik luar negeri (*Foreign Policy*) suatu negara. Salah satu sumber dalam negeri yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri (*Foreign Policy Analysis*) suatu negara adalah kekuatan militer. Australia memiliki tujuan (*Ends*) dan kepentingan untuk menjaga kawasan Laut China Selatan agar memiliki stabilitas keamanan yang tinggi, sehingga kepentingan nasional Australia menjadi tidak terganggu. Hal ini diikuti dengan penguatan sarana-prasarana militer Australia bersama aliansi di kawasan dan beberapa cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Beberapa kepentingan nasional Australia dan strategi pencapaiannya mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Australia. Tujuan dan tindakan Negara Australia ini, kemudian mendapat respon negara kawasan. Dan demikian seterusnya mewarnai politik internasional.

**Kata Kunci:** Analisa kebijakan politik luar negeri, Laut China Selatan & Konflik

### PENDAHULUAN

“*Civis pacem para bellum*”, jika ingin damai maka harus siap untuk berperang<sup>1</sup>. Adagium ini pada umumnya berlaku hampir di semua negara didunia. Mereka berkomitmen untuk tidak melaksanakan peperangan, tetapi siap menjaga kedaulatan negara apabila ada negara lain menyerang. Sehingga mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian, karena dengan pertahanan yang kuat, maka akan menjadi efek gentar (*deterrence effect*) yang ampuh untuk menahan keinginan negara lain melakukan agresi. Dan upaya tersebut diterapkan oleh Australia dengan menyusun buku putih pertahanan dan buku putih kebijakan politik luar negeri guna

mencapai keseimbangan aspek keamanan, stabilitas dan kesejahteraan (*security, stability and prosperity*). Telah menjadi keniscayaan, bahwa pertahanan dan Hubungan internasional merupakan dua (2) sisi dalam satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan<sup>2</sup>.

Persaingan pengaruh terutama antara Amerika Serikat dan Cina, telah menjadi pendorong utama dinamika strategis di kawasan. Persaingan berlangsung di seluruh kawasan Indo-Pasifik dan semakin meningkat di wilayah yang mendekati Australia, yaitu wilayah dari Samudra Hindia bagian timur laut melalui laut dan daratan Asia Tenggara hingga Papua Nugini dan Pasifik Barat Daya. Sejak 2016, negara-negara besar menjadi lebih tegas dalam memajukan kepentingan nasional

---

<sup>1</sup> Sebuah Peribahasa Latin, banyak yang meyakini bahwa peribahasa ini dikutip dari penulis militer Romawi Publius Flavius Vegetius Renatus, “*Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum*”. Ide pokok

perkataan ini sudah ditemukan pada Undang-undang VIII Plato 347 SM

<sup>2</sup> AA Banyu Perwita. Strategi Pertahanan Negara Kepulauan: Perspektif HI. Seminar Nasional Seskoal. 23 Juni 2021

mereka dan berusaha untuk memberikan pengaruh, termasuk upaya aktif China untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di Indo-Pasifik dan Kawasan Laut China Selatan. Australia cukup prihatin dengan perilaku asertif China yang dapat merusak stabilitas di Indo-Pasifik dan kawasan Laut China Selatan. China melaksanakan reklamasi dan kemudian membangun pangkalan militer dengan senjata artileri pertahanan udara. Fasilitas pangkalan angkatan laut dibangun dengan cepat. Landasan pacu pesawat dibangun cukup panjang hingga mampu didarati oleh pesawat bomber yang membutuhkan landasan cukup panjang.

Prospek perlombaan senjata (arm races) angkatan laut di Asia Tenggara juga meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya dampak dari sengketa Laut Cina Selatan. Negara-negara yang bersengketa dengan Cina telah berpartisipasi dalam menunjukkan kemampuan maritim mereka. Negara-negara pesisir Laut Cina Selatan telah melakukan pengeluaran militer besar-besaran untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut mereka, termasuk di bidang penerbangan, maritim, sistem rudal anti kapal bergerak, dan pengawasan maritim. Cina gencar mendorong negara-negara ASEAN yang terlibat di Laut Cina Selatan untuk meningkatkan anggaran pertahanan dalam sepuluh tahun terakhir, khususnya di sektor angkatan laut. Prospek perlombaan senjata terkait dengan konteks yang lebih luas di mana perubahan ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian strategis atas kebangkitan Cina dan negara-negara ASEAN (Heiduk, 2018).

Dinamika lingkungan strategis kawasan laut China Selatan yang memanas ini, di perburuk dengan tantangan kebakaran hutan (Bushfires) di Australia yang massif, masalah ekonomi, dan pandemi Covid – 19 yang

berpotensi menjadi ancaman terhadap stabilitas negara. Kerapuhan stabilitas negara yang meningkat juga dapat berpotensi menyebabkan *Australian Defence Force* (ADF) lebih sering mendapat porsi tugas untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan, misi bantuan bencana dan berpotensi lebih ke kegiatan operasi pertahanan dalam negeri. Tindakan tanggap bencana dan ketahanan menuntut prioritas yang juga tinggi dalam perencanaan anggaran pertahanan Australia.

### LANDASAN TEORI

#### *Foreign Policy Analysis* (Analisa Kebijakan Politik Luar Negeri)

Marijke Breuning, dalam bukunya *“Foreign Policy Analysis a Comparative Introduction”* (2007), berpendapat bahwa *“Foreign policy analysis is motivated by the desire to understand the interactions of countries”*<sup>3</sup>. (Analisis kebijakan luar negeri dimotivasi oleh keinginan untuk memahami interaksi negara).

Sedangkan Alex Mintz dan Karl deRouen menulis buku *“Understanding Foreign Policy Decision Making”* (2010), berargumen bahwa *“Foreign policy decision making refers to the choices individuals, groups, and coalitions make that affect a nation’s actions on the international stage”*<sup>4</sup>. (Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mengacu pada pilihan yang dibuat individu, kelompok, dan koalisi yang mempengaruhi tindakan suatu negara di panggung internasional).

Selanjutnya, Banyu Perwita dan YM Yani (2017), menuliskan pendapatnya bahwa *“Politik luar negeri (Foreign Policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, dan sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional”*<sup>5</sup>. Apabila

<sup>3</sup> Marijke Breuning (2007). *Foreign Policy Analysis a Comparative Introduction*. Palgrave Macmillan. h.21.

<sup>4</sup> Alex Mintz dan Karl deRouen (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press. h. 3

<sup>5</sup> AA Banyu Perwita dan YM Yani (2017). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Cetakan kelima). Remaja Rosdakarya Bandung. h. 47.

politik adalah studi tentang *who gets what, when, and how*, maka politik internasional adalah mengenai *who gets what, when, and how* dalam arena dalam arena internasional.

### **Konsep Dilema Keamanan (*Security Dilemma*)**

Setiap negara tidak dapat mengabaikan permasalahan pertahanan dan keamanan dalam merumuskan politik luar negerinya. Begitu krusialnya kebijakan tentang pertahanan dan keamanan, sehingga memunculkan sebuah dilemma keamanan atau *security dilemma*. Dilema Keamanan merupakan suatu konsep bagian dari teori realisme yang didasarkan pada sebuah asumsi bahwa tindakan suatu negara meningkatkan kekuatannya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara lain. Tindakan untuk meningkatkan kapasitas militer suatu negara ini dapat memposisikan negara tersebut sebagai negara yang dapat mengancam negara lain atau berada pada posisi terancam sekaligus (Ashari, 2015).

### ***Arms Races (Perlombaan Senjata)***

Dalam teori perlombaan senjata, masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan persenjataan yang lebih modern dan mencukupi dalam jumlah. Pada saat yang sama menghalangi pihak lain memperoleh keunggulan senjata. Implikasinya adalah bahwa ada ketidakstabilan perlombaan senjata karena masing-masing pihak memperoleh lebih banyak senjata. Masing-masing pihak, bagaimanapun, berusaha untuk mendapatkan senjata tambahan, memperkuat kecurigaan pihak lain dan mendorong akuisisi senjata lebih lanjut. Namun, persediaan senjata yang besar dan terus bertambah, memperkuat pencegahan dan membuat serangan pendahuluan menjadi tidak mungkin, sehingga berkontribusi pada stabilitas terhadap pecahnya perang (Intriligator & Brito, 2008).

### **Teori Kompleksitas Keamanan Regional/*Regional Security Complex Theory (RSCT)***

Teori kompleksitas keamanan regional merupakan salah satu dari teori keamanan internasional, yang dapat diartikan sebagai cara-cara yang diambil oleh suatu negara dan organisasi internasional untuk meyakinkan terselenggaranya keamanan dan keselamatan bersama. Keamanan internasional dan keamanan nasional memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan internasional adalah keamanan nasional dalam skala global (Buzan, 1992). Pemikiran tentang keamanan internasional melingkupi berbagai hal yang saling terkait dengan upaya untuk mempertahankan diri dari suatu negara, baik yang bersifat tradisional dengan terjadinya perang sebagai konsekuensi, maupun bersifat non tradisional yang dapat menyebabkan instabilitas pada suatu negara (Buzan et al., 1998). RSCT merupakan salah satu cabang dari teori keamanan internasional yang menganut aliran konstruktivisme yang menyampaikan bahwa keamanan internasional dapat dibangun secara bersama atas dasar kesamaan identitas dan kepentingan, yang dibangun berdasarkan berbagai faktor sosial kemasyarakatan (Wendt, 2000).

### **Teori Strategi**

Carl Von Clausewitz dalam bukunya “On War” (1832) mengemukakan bahwa Strategi sebagai “*The employment of the battle as the means towards the attainment of the object of the War*”. Strategi adalah penggunaan pertempuran sebagai cara memperoleh tujuan-tujuan perang. Perang hanyalah merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Definisi strategi menurut Liddel Hart (1967) adalah “*the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy*”. Strategi adalah seni mendistribusikan dan menggunakan (ways) sarana militer (means) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (ends)<sup>6</sup>.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu adanya analisis terhadap tensi LCS dan respon dari perspektif Pemerintah Australia. Sehingga,

<sup>6</sup> Marsono dan Tri Legionosuko (2020). Teori Strategi. Unhan Press. h.38

Penulis fokus untuk menganalisis urgensi dan respon “**Bagaimanakah analisis kebijakan politik luar negeri pada konflik Laut China Selatan dari perspektif Australia**”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Konstelasi Negara Australia

Negara Persemakmuran Australia dibagi menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah daratan utama. Negara bagian adalah: New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, dan Australia Barat. Dua wilayah daratan utama adalah: Australian Capital Territory dan Northern Territory. Selain itu, ada tujuh wilayah eksternal, yaitu Kepulauan Ashmore dan Cartier, Wilayah Antartika Australia, Pulau Christmas, Kepulauan Cocos (Keeling), Kepulauan Laut Karang, Pulau Heard dan Kepulauan McDonald, serta Kepulauan Norfolk. Di sebelah utara terdapat Indonesia dan Papua Nugini yang menghubungkan Australia dengan benua Asia dan belahan bumi utara. Australia memiliki jumlah penduduk 25,5 juta jiwa dengan indeks pembangunan manusia salah satu yang tertinggi di dunia. Australia, berdiri 1 Januari 1901 dengan luas wilayah 7,617,930 km<sup>2</sup>.



**Gambar 2.1** Peta Australia

Sumber : [www.worldatlas.com](http://www.worldatlas.com)

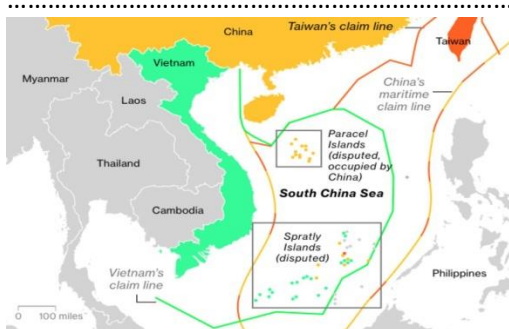
Pemerintahan Australia memiliki Ibukota Negara di Canberra, yang berada di *Australian Capital Territorial*. Ratu Inggris berstatus sebagai kepala negara sedangkan Perdana Menteri, saat ini Scott Morrison,

merupakan kepala pemerintahan. Kabinet pemerintahan Australia memiliki Komite Keamanan Nasional (NSC) yang berfungsi memberikan pertimbangan kebijakan luar negeri utama dan masalah keamanan nasional, perlindungan perbatasan, respon nasional terhadap dinamika di lingkungan strategis nasional dan global dan hal-hal konfidensial yang berkaitan dengan kegiatan intelijen. NSC diketuai oleh perdana menteri yang mengkoordinasikan langsung lima Departemen: Luar Negeri dan Perdagangan, Pertahanan, Dalam Negeri, Keuangan, dan Jaksa Agung (Australian Government, 2017).

Australia merupakan salah satu dari dua puluh kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan GDP hampir mencapai 1,4 Triliun USD dan pendapatan per kapita 55.000 USD. Nilai ekspor Australia mencapai 231,6 miliar dollar per tahun 2017 dengan komoditas utama energi dan sumber daya mineral (bijih besi, batu bara, emas) dan makanan (daging sapi, gandum). Sepertiga (33,5%) tujuan ekspor Australia adalah Cina, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan masing-masing 14,6% dan 6,6%. Cina juga merupakan mitra impor terbesar Australia yang menyusun 23% dari total nilai impor sebesar 221 miliar dollar. Pandemi COVID-19 menurunkan GDP Australia hingga 7% yang membawanya ke resesi untuk pertama kalinya dalam tiga puluh tahun terakhir (Janda & Lasker, 2020).

#### Konstelasi Kawasan Laut China Selatan.

Secara geografis, Laut Cina Selatan memainkan peran penting dalam geopolitik Indo-Pasifik. Laut Cina Selatan (LCS) berbatasan dengan Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Formasi pulau dan karang utama di Laut Cina Selatan adalah Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Pratas, Kepulauan Natuna, dan Beting Scarborough (Lowy Institute, 2021).



**Gambar 2.2 Peta Konflik LCS**  
 Sumber: (Bloomberg, 2021)

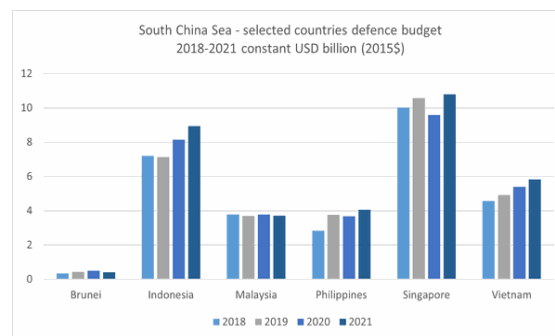
Bagi dunia, negara kawasan dan negara Australia, LCS penting secara strategis karena beberapa alasan (Lowy Institute, 2021), yaitu jalur perdagangan antara Eropa, Timur Tengah dan Asia Timur lewat dari Samudera Hindia, melalui Selat Malaka dan selanjutnya menggunakan LCS sebagai rute selanjutnya ke Korea Selatan, Jepang dan Cina. Jalur perdagangan dari Australia, ke Jepang dan Asia Timur. Diyakini sumber daya hidrokarbon yang signifikan berada di wilayah laut yang luas di LCS. Li Guoqiang dari Cina Institute of International Studies menyatakan bahwa cadangan minyak dan gas dari cekungan utama di LCS berjumlah 70,78 miliar ton, di mana deposit minyak bumi terdiri dari 29,19 miliar ton dan deposit gas alam terdiri dari 58 triliun meter kubik.



**Gambar 2.3 Kawasan LCS berdasar UNCLOS**  
 Sumber: (UNCLOS, CIA, 2019)

Sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2021, ketegangan di Laut Cina Selatan terus melonjak. Tensi ini terjadi karena aksi asertif Cina yang terus berlanjut ditambah

dengan memburuknya hubungan Amerika Serikat (AS)-Cina yang tajam atas berbagai masalah termasuk Laut Cina Selatan. Tindakan yang dilakukan oleh Beijing untuk menegaskan klaim yurisdiksinya, dan menunjukkan bahwa virus corona tidak merusak tekad politiknya atau kesiapan operasional Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Amerika Serikat bersama Australia, Jepang dan India telah meningkatkan kehadiran militernya di Laut Cina Selatan.



**Gambar 2.4 Peningkatan Anggaran Militer Negara ASEAN 2018-2021**

Sumber: (DSEI Japan, 2021)

Prospek perlombaan senjata (arm races) angkatan laut di Asia Tenggara juga meningkat. Negara-negara kawasan Laut Cina Selatan telah melakukan pengeluaran militer besar-besaran untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut mereka, termasuk kekuatan udara, maritim, sistem rudal anti kapal selam dan permukaan.

### ***Karakteristik militer Australia.***

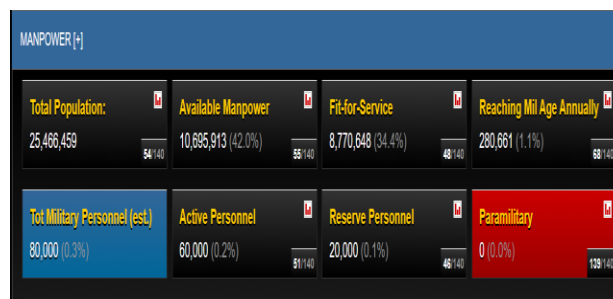
*Domestic Source* atau sumber lingkungan internal suatu negara akan mempengaruhi sifat dan jalannya kebijakan politik luar negeri (*Foreign Policy*) suatu negara. Salah satu sumber dalam negeri yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri (*Foreign Policy Analysis*) suatu negara adalah kekuatan militer. Kekuatan militer suatu negara, sangat menentukan strategi kebijakan politik luar negeri suatu negara. Peningkatan kemampuan militer suatu negara dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, negara-negara dengan kemampuan militer yang lemah atau rendah cenderung untuk mengejar tujuan kebijakan mereka dan

bergantung pada sekutu yang memiliki kekuatan yang lebih besar untuk perlindungan mereka.

Strategi berarti menyelaraskan antara tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*). Ketiga elemen ini harus selaras agar strategi dapat berjalan efektif. Jika tujuan berubah maka dua faktor lainnya juga harus berubah. Strategi akan membantu untuk mendisiplinkan pemikiran untuk menyikapi kompleksitas dan perubahan mengenai kontinuitas, isu, peluang, dan ancaman

Australia memiliki tujuan (*Ends*) dan kepentingan untuk menjaga kawasan Laut China Selatan agar memiliki stabilitas keamanan yang tinggi, sehingga kepentingan nasional Australia menjadi tidak terganggu karenanya. Australia juga berkepentingan untuk menjaga agar kawasan tersebut tetap berada dalam kawasan yang menjadi suatu kawasan yang bebas bagi jalur pelayaran, baik dalam hal perdagangan, maupun pelintasan dari kapal perang yang akan mengamankan kapal-kapal niaga dari Australia, ataupun negara lainnya. Sesuai teori Kompleksitas Keamanan Regional (*Regional Security Complex Theory* (RSCT)), keamanan internasional dan keamanan nasional memiliki keterikatan satu sama lain, sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan internasional adalah keamanan nasional dalam skala global (Buzan, 1992).

Alat utama sistem persenjataan (*Means*) angkatan bersenjata Australia saat ini memiliki, antara lain: sekitar 100 pesawat tempur, kemampuan patroli maritim dan patroli udara, 6 kapal selam dan peningkatan pertahanan udara dan rudal, termasuk rudal balistik, dan sistem senjata berpemandu. Dengan perincian sebagai berikut :



**Gambar dan Tabel Kekuatan Militer Australia 2021**

Sumber : Global Fire Power 2021<sup>7</sup>

Australia menggunakan cara-cara (*ways*), yaitu melakukan aliansi utama dengan Amerika Serikat. Mereka kemudian bersama Jepang dan India membentuk Quadrilateral di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di kawasan Laut China Selatan. Aliansi ini mengurung kawasan agar militer China tidak menjadi dominan di kawasan tanpa ada negara lain yang bertindak sebagai kekuatan penyeimbang. Australia yang memiliki sejarah yang panjang dalam bersekutu dengan Amerika Serikat, untuk kemudian berupaya untuk membantu untuk menandingi dominasi kekuatan militer China di kawasan Laut China Selatan.

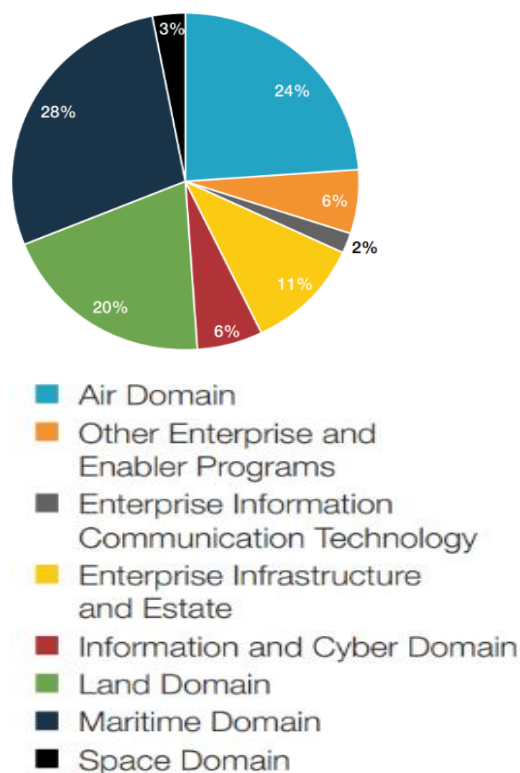
Australian Defence Force (ADF) memastikan cara mereka beroperasi dengan profesional dari pangkalan militer, pangkalan Angkatan Laut, dan pangkalan Angkatan Udara di seluruh Australia terlatih dengan baik dalam memobilisasi personel saat aset atau aliansi membutuhkan. Cara lain yang telah dilakukan Australia guna mencapai tujuan dari strategi militer adalah dengan meminimalkan sistem yang dimiliki ADF (*Australian Defence Force*) untuk mengurangi biaya pemeliharaannya dan pengoperasiannya. Contohnya hanya memiliki satu jenis pesawat tempur, satu jenis tank, satu jenis fregat, satu jenis kapal selam, dan satu jenis tanker. Beberapa komponen masih berasal dari luar, tapi saat ini telah menetapkan bahwa lebih dari 90% komponen yang digunakan seperti kapal selamnya diproduksi di Australia. Upaya untuk mempertahankan dan

<sup>7</sup> [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country\\_id=australia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=australia)

meningkatkan kemampuan lebih penting daripada merancang dan membangun sistem sendiri.

### Anggaran Militer

Australia sebenarnya memiliki anggaran yang cukup namun personel yang terbatas, sehingga anggaran yang ada digunakan untuk memperoleh teknologi canggih yang berasal dari AS maupun Eropa. Dengan fakta itu, Australia menempatkan prioritas tinggi untuk melindungi prajuritnya. Pertimbangan pemilihan alutsista dari AS dan aliansi adalah untuk mewujudkan interoperabilitas dan kontribusi pada gugus tugas yang dipimpin AS, sehingga sistem yang dibangun sinkron dengan sistem AS. Dampaknya ada negara tertentu yang tidak menjadi pertimbangan dalam pengadaan Alutsista seperti dari China dan Rusia.



**Gambar 1.1** *Proportional Program and Capability Investment 2020-2030*

Sumber : *Australian Department of Defence (2020)*

Dalam rencana Postur atau struktur militer tahun 2024, menyatakan bahwa militer yang sebelumnya fokus pada upaya defensif, ke

depan akan lebih banyak pada upaya ofensif. Seperti peningkatan pertahanan udara dan rudal, termasuk rudal balistik, dan sistem senjata berpemandu. Dalam konflik modern, Australia memerlukan senjata berpemandu dengan jumlah besar yang tentunya berimplikasi pada dukungan anggaran. Dalam pembaruan strategis pertahanan 2020, ada rencana pendanaan 10 tahun hingga 2030. Anggaran pertahanan akan tumbuh dari sekitar USD 30 miliar/tahun menjadi sekitar USD 54 miliar. Terjadi peningkatan 87% selama 10 tahun, pengeluaran pertahanan tahun lalu melewati 2% dari PDB dan itu pertama kalinya di atas 2% dari PDB selama hampir 30 tahun. Hal itu mungkin akan terus berlanjut selama 10 tahun ke depan. Pemerintah Australia menetapkan program kemampuan pertahanan yang ambisius dalam pembaruan strategis 2020.

### Pembahasan

#### **Kepentingan nasional Australia dalam memelihara stabilitas keamanan di kawasan Laut China Selatan.**

Lokasi Australia yang berada di selatan dari kawasan Laut China Selatan dan tidak bersinggungan, menyebabkan negara tersebut tidak terdampak langsung dengan perebutan atas klaim dari sebagian ataupun keseluruhan dari kawasan tersebut.. Akan tetapi stabilitas keamanan di kawasan menjadi hal yang menjadi pertimbangan bagi Australia, oleh karena merupakan jalur perdagangan yang sangat sibuk dan hampir sepertiga dari nilai perdagangan melintasi wilayah tersebut. Termasuk bagi Australia, kawasan tersebut menjadi pelintasan utama bagi lalu lintas perdagangan antara negara tersebut dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur.

Australia berkepentingan untuk menjaga kawasan Laut China Selatan memiliki stabilitas keamanan yang tinggi, sehingga kepentingan nasional Australia menjadi tidak terganggu karenanya. Australia juga berkepentingan untuk menjaga agar kawasan tersebut tetap berada dalam kawasan yang

menjadi suatu kawasan yang bebas bagi jalur pelayaran, baik dalam hal perdagangan, maupun pelintasan dari kapal perang yang akan mengamankan kapal-kapal niaga dari Australia, ataupun negara lainnya.

Dengan adanya klaim *Nine-Dash-Line* yang dikeluarkan oleh China maupun Taiwan, menyebabkan sebagian ataupun hampir seluruh dari kawasan Laut China Selatan akan menjadi bagian dari laut teritorial dari suatu negara yang kemudian akan menyebabkan kebebasan bernavigasi menjadi terbatas. Jalur perniagaan akan diatur oleh negara yang memiliki klaim tersebut dan disesuaikan dengan ketentuan pelayaran dalam perairan dalam yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Perebutan atas klaim yang dilakukan oleh beberapa negara akan menyebabkan eskalasi ancaman terjadinya konflik terbuka yang melibatkan Angkatan Bersenjata dari beberapa negara yang berkonflik, sehingga stabilitas keamanan di kawasan tersebut menjadi terganggu, yang untuk kemudian berdampak pada lalu lintas perdagangan. Bertumbuhnya ekonomi China yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, berdampak pada berkembangnya kekuatan dan kemampuan Angkatan Bersenjata China, yang untuk kemudian mendominasi kekuatan militer di kawasan tersebut. Dominasi kekuatan militer China dikhawatirkan oleh beberapa negara dunia, termasuk Australia, akan menjadi unsur pemaksa agar klaim NDL China dapat diakui oleh negara-negara lainnya yang memiliki klaim bersinggungan.

Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama bagi Australia, tidak menginginkan kekuatan militer China menjadi terlalu dominan di kawasan tanpa ada negara lain yang bertindak sebagai kekuatan penyeimbang. Terlebih dengan sikap China yang cukup koersif dalam hal ekonomi, politik maupun manuver bersenjata, tidak saja di kawasan Laut China Selatan, tetapi juga kawasan lain yang bertetangga dan juga terhadap negara tertentu, termasuk Australia. Australia yang memiliki sejarah yang panjang

dalam bersekutu dengan Amerika Serikat, untuk kemudian berupaya untuk membantu untuk menandingi dominasi kekuatan militer China di kawasan Laut China Selatan. Hal ini juga disebabkan kekuatan militer China yang dominan di kawasan akan mengganggu stabilitas keamanan dari Taiwan yang dilindungi oleh Amerika Serikat.

Dari penjelasan yang disampaikan diatas bahwa kepentingan nasional Australia terhadap stabilitas keamanan di kawasan Laut China Selatan adalah agar kepentingan nasional Australia yang terkait dengan lalu lintas perdagangan yang melintas tidak menjadi terganggu. Sementara itu Australia juga mendukung upaya sekutu lamanya Amerika Serikat, untuk menandingi dominasi kekuatan militer China di kawasan, agar tidak secara sepihak klaim NDL untuk diakui sebagai batas wilayah perairan dalam dari China yang akan kebebasan bernavigasi dari berbagai pelintasan. Selain itu dukungan Australia terhadap Amerika Serikat juga disebabkan untuk mengamankan wilayah kedaulatan Taiwan yang memiliki kedekatan, agar tidak di invasi oleh China.

Pertumbuhan dan perkembangan Angkatan Laut global, dimana tumbuhnya pembentukan kemampuan yang lebih canggih, yang dikembangkan oleh China untuk memproyeksikan kekuatan dan kehadirannya di sekitar kawasan indo Pasifik. Ini akan menjadi ancaman potensial untuk operasi melawan Taiwan maupun di luar Taiwan, serta berpotensi juga untuk mengancam negara lain dalam pengendalian laut, seperti kepulauan Natuna, Selat Malaka, Selat Lombok dan selat Sunda dimana china dapat mengendalikan perdagangan yang melalui Laut China Selatan, sesuai dengan teori Sea Power AT Mahan, mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, dan akan menguasai kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia.



### **Kepentingan nasional Australia terhadap kerja sama keamanan maritim di kawasan Laut China Selatan.**

Keamanan maritim bisa dikatakan sebagai isu yang syarat akan *security*. muncul di tiap negara dengan masing-masing pengaruh lingkungan eksternal dan respon yang diambil oleh negara yang menganggap isu tersebut sebagai suatu ancaman yang harus segera ditanggapi, sehingga *maritime security* mengalami perluasan makna terhadap perkembangan terhadap isu saat ini yang makin kompleks. Menurut *The United Nations Secretary-General* tidak mendefinisikan *Maritime Security* secara detail, akan tetapi dalam *Report on Oceans and the Law of the Sea* pada tahun 2008 menyebutkan beberapa indikasi yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terhadap *Maritime Security*, antara lain *Piracy dan Armed Robbery Terrorist acts, Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction, Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance, Smuggling dan trafficking of persons, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* (Klein et al., 2010)

Kekayaan maritim dunia belum semuanya diolah, yang diyakini memiliki potensi untuk mensejahterakan masyarakat suatu negara. Oleh karena pentingnya kawasan maritim, maka isu-isu untuk menjaga keamanan maritim menjadi salah satu fokus dari pemerintah Australia, terutama dalam menjaga keberlangsungan kepentingan nasionalnya. Termasuk diantaranya kawasan Laut China Selatan. Australia memandang perlu untuk terus menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut, selain untuk menjaga keselamatan dari kapal niaganya, juga dalam rangka mempertahankan kebebasan untuk melakukan navigasi, tanpa adanya hambatan yang menyulitkan pencapaian kepentingan nasionalnya. Pemerintah Australia tidak bertindak sendiri dalam menjaga keamanan maritim di kawasan tersebut, akan tetapi juga mendorong negara-negara yang berada disekitar kawasan Laut China Selatan, untuk secara bersama-sama, ataupun secara mandiri menjaga keamanan maritim negaranya. Tidak

saja dalam rangka menghadapi ancaman yang sifatnya tradisional, tetapi juga yang bersifat non-tradisional, seperti pencegahan eksploitasi hasil laut secara ilegal.

Australia tidak saja berupaya untuk menjaga keamanan maritim di kawasan Laut China Selatan dengan mengadakan kerja sama secara bilateral dengan negara-negara di kawasan, tetapi juga melakukannya bersama negara sekutunya secara bersama-sama dalam membentuk suatu aliansi, seperti QUAD. Australia juga memandang perlu untuk menjaga keamanan maritim di kawasan dengan secara aktif berperan serta dalam kerja sama pertahanan lainnya yang ada di kawasan Laut China Selatan, dalam hal ini adalah ADMM Plus. Secara umum bahwa keamanan maritim di kawasan Laut China Selatan menjadi fokus utama dalam menjaga mkepentingan nasional Australia. Upaya yang dilakukan oleh Australia tidak saja dengan terlibat secara langsung mengamankan kawasan maritim, tetapi juga melalui berbagai organisasi kerja sama keamanan maritim yang ada di kawasan. Termasuk dengan mendorong negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan keamanan di kawasan maritim negaranya masing-masing.

Secara geopolitik, Amerika Serikat dan Australia meskipun bukan negara Kawasan Asia Pasifik tetapi mempunyai pula kepentingan geopolitik di kawasan ini. Kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan Australia adalah menciptakan perdamaian stabilitas di kawasan ini sekaligus mengeliminasi sedini mungkin adanya ancaman terhadap dominasinya. Sama halnya dengan Australia, Mengacu pada *Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030*, kepentingan paling strategis Australia adalah mempertahankan negeri itu dari serangan bersenjata langsung. Sebagaimana disampaikan oleh Walt (1987) menjelaskan bahwa ketika terancam, negara dapat mencari keselamatan baik dengan menyeimbangkan, bersekutu dengan negara lain melawan ancaman yang ada, atau ikut-ikutan, menyelaraskan diri dengan kekuatan yang

mengancam (Walt, 1987). Untuk mencapai kepentingan itu, Australia memiliki kepentingan mendasar untuk mengendalikan jalur pendekat udara dan laut menuju wilayahnya. Berdasarkan pertimbangan geopolitik ini, maka keamanan maritim menjadi isu yang sangat penting dalam keamanan global dewasa ini (Rahakundini Bakrie, 2007). Sesuai dengan karakteristik Asia Pasifik yang didominasi oleh laut, isu keamanan maritim merupakan salah satu isu krusial di kawasan. Terdapat persaingan geopolitik antar negara di Kawasan Asia Pasifik untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing tidak terkecuali Australia.

### **Strategi Australia dalam penyediaan Alutsista untuk kepentingan pertahanan negara.**

Strategi berarti menyelaraskan antara tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*). Ketiga elemen ini harus selaras agar strategi dapat berjalan efektif. Stabilitas Australia telah berdampak pada struktur dan kemampuan militer Australia selama 50 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Saat ini Australia memiliki, antara lain: sekitar 100 pesawat tempur, kemampuan patroli maritim dan patroli udara, 6 kapal selam dan kemampuan amfibi serta kemampuan pengamanan perbatasan di laut. Australia sebenarnya memiliki anggaran yang cukup namun personel yang terbatas, sehingga anggaran yang ada digunakan untuk memperoleh teknologi canggih yang berasal dari AS maupun Eropa. Dengan fakta itu, Australia menempatkan prioritas tinggi untuk melindungi prajuritnya. Pertimbangan pemilihan alutsista dari AS dan aliansi adalah untuk mewujudkan interoperabilitas dan kontribusi pada gugus tugas yang dipimpin AS, sehingga sistem yang dibangun sinkron dengan sistem AS. Dampaknya ada negara tertentu yang tidak menjadi pertimbangan dalam pengadaan Alutsista seperti dari China dan Rusia.

Dinamika global saat ini yang menonjol adalah upaya China yang mencoba mengubah

sistem regional, diantaranya dengan membangun pulau buatan di LCS sebagai pangkalan militer. China mengembangkan kemampuan militer yang tidak hanya dapat mengancam tetangga dekatnya, tetapi juga dapat menjangkau dan mengancam Australia. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan pergeseran *balance of power* dari kekuatan militer di LCS. Menurut Lee (2003), indikasi yang ada menunjukkan bahwa China tidak akan memancing AS untuk ikut dalam aksi militer. China tidak memberi alasan bagi AS terlibat dalam sengketa di LCS dengan menyatakan konflik kawasan harus diselesaikan secara bilateral. Pendekatan China di LCS dicirikan melalui strategi "*salami slice*" (McDevitt, 2014). China terus mengambil langkah kecil secara bertahap yang tidak memicu respons militer pihak berlawanan.

Dengan berpijak pada pandangan keseimbangan kekuatan militer antara AS dan China, salah satu kesimpulannya adalah AS mungkin tidak dapat memberikan bantuan setiap saat kepada Australia. Kesimpulan itu menuntut Australia untuk dapat berbuat lebih banyak lagi, sehingga ketergantungan pada AS perlu diubah. Hal itu memungkinkan bahwa alutsista yang digunakan juga harus berubah. Ini berarti Australia akan membutuhkan peningkatan kemampuan secara mandiri sehingga berdampak pada risiko rantai pasokan. Australia perlu berbuat lebih banyak dalam hal melindungi rantai pasokannya dengan kemampuan militer.

Strategi lain yang telah dilakukan Australia adalah dengan meminimalkan sistem yang dimiliki ADF (*Australian Defence Force*) untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan pengoperasiannya. Contohnya hanya memiliki satu jenis pesawat tempur, satu jenis tank, satu jenis fregat, satu jenis kapal selam, dan satu jenis tanker. Beberapa komponen masih berasal dari luar, tapi saat ini telah menetapkan bahwa lebih dari 90% komponen yang digunakan seperti kapal selamnya diproduksi di Australia. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lebih penting

daripada merancang dan membangun sistem sendiri.

## PENUTUP

### Kesimpulan

*Domestic Source* atau sumber lingkungan internal suatu negara akan mempengaruhi sifat dan jalannya kebijakan politik luar negeri (*Foreign Policy*) suatu negara. Salah satu sumber dalam negeri yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri (*Foreign Policy Analysis*) suatu negara adalah kekuatan militer. Kekuatan militer suatu negara, sangat menentukan strategi kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Lokasi Australia yang berada di selatan dari kawasan Laut China Selatan dan tidak bersinggungan, menyebabkan negara tersebut tidak terdampak langsung dengan perebutan atas klaim dari sebagian ataupun keseluruhan dari kawasan tersebut oleh China. Akan tetapi stabilitas keamanan di kawasan menjadi hal yang menjadi pertimbangan bagi Australia, oleh karena merupakan jalur perdagangan yang sangat sibuk dan hampir sepertiga dari nilai perdagangan melintasi wilayah tersebut. Termasuk bagi Australia, kawasan tersebut menjadi pelintasan utama bagi lalu lintas perdagangan antara negara tersebut dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur.

### Saran

Perlunya penelitian lebih lanjut dari perspektif China maupun Amerika Serikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] AA Banyu Perwita dan YM Yani (2017). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Cetakan kelima). Remaja Rosdakarya Bandung. h. 47.
- [2] Marsono dan Tri Legionosuko (2020). Teori Strategi. Unhan Press. h.38
- [3] Marijke Breuning (2007). Foreign Policy Analysis a Comparative Introduction. Palgrave Macmillan. h.21.
- [4] Alex Mintz dan Karl deRouen (2010). Understanding Foreign Policy Decision Making. Cambridge University Press. h. 3
- [5] Buzan, B. (1992). The evolution of international society. In *International Affairs* (Vol. 68, Issue 4). <https://doi.org/10.2307/2622712>
- [6] Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner.
- [7] Klein, N., Mossep, J., & Rothwell, D. (2010). *Maritime Security; International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand* (1st editio). Routledge.
- [8] Rahakundini Bakrie, C. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* (Pertama). Yayasan Obor Indonesia.
- [9] Wendt, A. (2000). *Social theory of international politics*. <https://doi.org/10.5860/choice.37-5935>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN